



Deforestation-Free Toolkit for Indonesian Smallholders



DIREKTORAT ADVOKASI DAN KERJASAMA DESA DAN PERDESAAN
→ DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI



Background



- Banyak desa yang memiliki komitmen untuk menjaga dan melindungi hutannya karena itu merupakan sumber kehidupan. Untuk memastikan itu, desa sudah membuat peraturan desa terkait perlindungan hutan. Peran stakeholder disini mendampingi mereka untuk masalah tersebut, serta membantu penguatan SDM desa.
 - Agenda *No Deforestation* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi saat ini. Pasar minyak sawit di dunia menghendaki ada produk sawit yang ramah lingkungan dan tidak menebang hutan. Sejalan dengan itu, desa yang punya sawit ini melakukan perlindungan hutan. Namun hasilnya memang belum terlihat, karena itu perlu ada advokasi di tingkat lokal khususnya perusahaan sawit yang ada di sekitar desa atau dalam desa untuk menghormati desa dalam agenda perlindungan hutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemberian harga yang adik, tak ada konflik dengan desa dll.
 - Advokasi untuk mempromosikan praktek-praktek terbaik yang dilakukan desa sangat perlu dilakukan dengan adanya toolkit ini juga dan mendorong pembeli minyak sawit global untuk melakukan engagement dengan desa penghasil sawit yang melindungi hutannya. Oleh karena itu, kegiatan *launching* panduan bagi petani sawit di desa ini dilaksanakan untuk melakukan perlindungan hutan yang ada di desa/konservasi dengan memastikan para pihak (pasar minyak sawit) untuk memberikan insentif bagi desa atau kelembagaan desa terkait dengan perlindungan hutan yang dilakukan oleh desa.

Key Points

1. Pentingnya peran desa untuk konservasi hutan dan mengatasi konflik SDA di tingkat desa.
2. Relevansi konservasi hutan dalam kebijakan kebijakan desa dan bentuk dukungan.
3. Respon terhadap inisiasi adanya pendekatan perlindungan hutan oleh petani di desa.
4. Kebijakan desa sebagai pendukung untuk pembangunan keberlanjutan/SDGs desa dan peran pemdes.
5. Seruan dukungan untuk semua pihak termasuk perusahaan besar dan pasar pembeli minyak sawit. Bahwa desa saat ini punya inisiatif membuat produk sawit yang kompetitif karena itu perlu ada asas manfaat dari kegiatan perlindungan hutan oleh desa dimana negara negara lain yang membeli minyak sawit indonesia dari desa bisa lebih proaktif untuk membantu desa dalam hal akses pasar.





Workshop Pengembangan Potensi Desa Berbasis Sawit Tahun 2023



- Sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun juga timbul berbagai permasalahan terkait dengan akses lingkungan, sosial dan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam pengembangan sawit secara swadaya antara lain rendahnya produktivitas akibat bibit yang tidak berkualitas, kesulitan akses dan pembiayaan serta kendala kerjasama dengan korporasi.
- Berdasarkan hasil pendataan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di IDM, terdapat kurang lebih 16.829 desa di Indonesia yang terlibat dalam pengembangan kelapa sawit baik melalui korporasi maupun swadaya.
- Data lainnya menyebutkan bahwa banyak desa yang kesulitan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan sawit. Desa harus mengambil peran dan terlibat dalam tata kelola potensi sawit yang ada.
- Dari jumlah desa di Indonesia, terdapat desa-desa yang memiliki praktik baik dalam pengelolaan sawit. Di Kabupaten Kutai Barat, ada desa yang mengekspor biji sawit yang menjadi salah satu turunan dari produk sawit. Terdapat juga BUMDESMA yang mampu mendirikan pabrik untuk mengolah sawit.
- Kegiatan *workshop* diinisiasi oleh kolaborasi antara Kemendesa PDT dan Transmigrasi dalam hal ini Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, SPKS dan di dukung pendanaan oleh BPDP-KS. Ide ini merupakan hasil dari diskusi yang panjang untuk mengurai berbagai persoalan tata kelola sawit di desa, ketergantungan petani sawit dengan korporasi, dinamika fluktuasi harga sawit dan okupasi lahan.
- Sehingga, kegiatan Workshop Pengembangan Potensi Desa berbasis Sawit tahun 2023 diadakan untuk bertukar ide, gagasan dan pengalaman tentang menghadapi berbagai persoalan dan tata kelola sawit. Kegiatan ini mengundang hampir 400 kepala desa, organisasi masyarakat sipil dan NGO, Universitas, korporasi dan BPDP-KS.



Workshop Pengembangan Potensi Desa Berbasis Sawit Tahun 2023

Kegiatan ini hadir dalam bentuk diskusi dan dialog interaktif dengan tema “Hilirisasi Sawit Berbasis BUMDES: Membangun Indonesia Dari Desa” antara perwakilan Kepala Desa, Direktur BUMDes, BPD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, akademisi, jurnalis, perwakilan organisasi non-pemerintah (LSM) dan BPDP-KS.

Peserta Workshop

Kegiatan dihadiri oleh ± 400 peserta yang terdiri dari berbagai pihak (multi *stakeholders*) diantaranya perwakilan Kepala Desa, Direktur BUMDes/BUMDesma, Badan Perwakilan Desa (BPD), pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah, BPDP-KS, dan organisasi masyarakat sipil/non-pemerintah (NGO/LSM), akademisi dan jurnalis





Sekilas Workshop

- Panel diskusi sesi 1 dengan Narasumber 1 yaitu, Togu Rudianti Saragih, S.H, M.H Kelompok Kerja Budidaya Tanaman Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Dengan tema “Dukungan Kebijakan Kementerian Pertanian dalam Hilirisasi Sawit Berbasis Desa”
 - Tantangan pengembangan kelapa sawit diantaranya produktivitas rendah, hilirisasi yang belum optimal, lahan sawit berada dalam kawasan hutan dan KHG, tidak memiliki legalitas dan perizinan, gangguan usaha dan konflik, akses pasar, negative campaign, dan pemanfaatan potensi sumber daya yang belum maksimal.
- Panel diskusi sesi 1 dengan Narasumber 2 yaitu, Zeky Hamzah, S.E, Kepala Desa Tepian Langsat Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur. Dengan tema “Bersama Membangun Desa Melalui Kolaborasi Usaha Berbasis Sawit”
 - Investasi-investasi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsat diantaranya dari Palma Serasih Group, PT. Bima Palma Nugraha, DSN Group, PT. Anugerah Energitama, PT. Kutai Balian Nauli, PT. Dinamika Prima Artha, dan PT. Kalianusa.
 - Paradigma Bersama Membangun Desa diterapkan melalui penguatan sosial politik desa, penguatan proses perencanaan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel, penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan kolaborasi sumber daya.



Sekilas Workshop

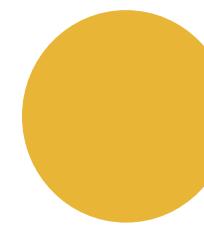
- Panel diskusi sesi 2 dengan Narasumber 1 yaitu, Hari Pambudi, S.T, Direktur Mitra Usaha Desa, menyampaikan paparan dengan tema “Peluang Kemitraan dengan Desa”.
 - Ahli di bidang sawit dan CPO membuat kajian untuk mengatasi masalah ketika sawit turun harga. Salah satu BUMDes di Muko-muko membangun CPO. PT. Mitra Usaha Desa yang bergerak dibidang industri kelapa sawit (CPO), perdagangan besar, pengembangan wisata, dan pelatihan kerja swasta. Kerjasama yang dijalankan adalah pembangunan, pengembangan, pendampingan pabrik mini CPO desa, yang dikelola oleh BUMDES/BUMDESMA dengan tujuan memberikan peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi petani dan pengurus BUMDES/BUMDESMA, dan dapat menambah pendapatan asli desa.
- Panel diskusi sesi 1 dengan Narasumber 2 yaitu, Yustus Laud, S.IP, M.Si, Kepala Desa Telaga Dua, Kec. Binjai Hulu, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat dengan paparan berjudul “Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Sawit untuk Kemandirian Desa”.
 - Desa ini siap membangun secara mandiri usaha untuk pembangunan desa. Salah satu unit usaha yang telah berjalan yaitu, Pabrik Mini Kelapa Sawit.
 - Pembangunan ini bertujuan untuk menampung petani swadaya di desa Telaga Dua dan sekitarnya yang selama ini banyak mengalami hambatan pada saat menjual Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik milik perusahaan diantaranya, penilaian/sortasi yang terlalu tinggi, serta harga yang tidak sesuai dengan harga ketetapan pemerintah



Sekilas Workshop

- Setiap sesi paparan dilanjutkan dengan sesi diskusi.
 - Kepala Desa Krayan Bahagia, Kec. Long Ikis, Kab. Paser:
 - Meskipun setiap desa memiliki masalah yang sama, namun setiap kabupaten memiliki keberpihakan berbeda antara pemerintah dan korporasi. Harapan saya memiliki semangat yang sama dalam membangun desa. Apa yang harus dilakukan desa jika BUMDES mati suri, harus membuat laporan dimana birokrasi yang agak lama dan berbelit. Harus ada stimulus dari pemerintah ketika desa ingin berkembang
 - Kepala Desa Antutan, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan
 - Mewakili dari 18 desa, menyampaikan permasalahan secara umum bahwa kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dan desa tidak membawa hasil untuk masyarakat desa. Kegiatan kelapa sawit hanya dimonopoli oleh perusahaan dan didukung oleh kabupaten atau dinas terkait karena jika mengeluh akan disalahkan. Saran pemerintah daerah harus ditegur dan jika masyarakat mengadu harus diakomodir.

Kemudian *workshop* diakhiri dengan pembentukan Asosiasi Desa Sawit Indonesia yang beranggotakan perwakilan tiap kepala desa dari masing-masing provinsi.



Dokumentasi Workshop



TERIMA KASIH



DIREKTORAT ADVOKASI DAN KERJASAMA DESA DAN PERDESAAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

